

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT NOMOR 23 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/I/2021 PENUNJUKKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungannya sehingga untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 33Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum dalam Lampiran I, Ruang Lingkup Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informsi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum pada Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/I/2021 Penunjukkan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 2 hlm